



<http://ppm.ejournal.id>

## JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

ISSN 2540-8739 (print) || ISSN 2540-8747 (online)

LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN



# Program Pemetaan dan Urgensi Penanganan Masalah Sosial Pada Wilayah Bukan Pesisir di Kabupaten Gresik

Edy Supriyadi<sup>1</sup>, Iha Haryani Hatta<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila, <sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received 02.02.2018

Received in revised

form 05.03.2018

Accepted 10.05.2018

Available online

21.12.2018

### ABSTRACT

This program aims to determine the geography, demography, psychography, economic, and socio-cultural conditions, as well as the urgency of handling social problems. The study used 100 respondents consisted of 20 respondents for 5 villages. Analysis used Descriptive and SWOT. The results of the study include land altitude between 3-4 meters from sea level, rarely rain, lowland, and hot weather; densely populated with nearly equal female population with men; the community is actively learning and carrying out the religious activities that are followed and the means of worship are good and complete; most of the conditions of the region have not supported the welfare of the population and regional development; village heads have a big influence and high role for society. Each region has the urgency of handling different problems but the main problem to be addressed is inadequate facilities and infrastructure, environment, lack of development of SME.

Keywords: Problem Solving, Social Mapping, SWOT Analysis.

DOI: 10.30653/002.201832.31



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. © 2018 Edy Supriyadi, Iha Haryani Hatta.

### PENDAHULUAN

Masalah sosial akan muncul pada daerah industri. Adanya industri besar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia dapat menimbulkan masalah sosial. Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang semakin rumit saat ini telah menempatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu pemikiran yang diharapkan mampu memberikan alternative solusi baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Budi, 2008, p. 1).

Masalah sosial di atas dapat ditangani bila perusahaan melakukan program CSR yang dilandasi dengan keinginan untuk berkembang bersama masyarakat. Menurut Hendrik Budi Untung (2014, p. 3), *corporate social responsibility* merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Disamping itu, Situmeang (2016, p. 10), menjelaskan bahwa seiring

<sup>1</sup> Corresponding author: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila. Jl. Borobudur No.7, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320. Email: [edyyadi2@univpancasila.ac.id](mailto:edyyadi2@univpancasila.ac.id)

dengan perkembangan isu lingkungan global, konsep dan aplikasi CSR semakin berkembang, termasuk di Indonesia. CSR tidak semata menjadi kewajiban sosial perusahaan. Tetapi CSR dapat mendorong keterlibatan dan inisiatif masyarakat dalam menyusun, menjalankan dan mengevaluasi program CSR perusahaan, sehingga program CSR mampu memandirikan masyarakat.

Program CSR tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, tidak menimbulkan masalah sosial antar stakeholders dan atau perusahaan, bila terlebih dahulu melakukan social mapping (pemetaan sosial) yang tepat. Melalui pemetaan sosial akan mengetahui stakeholders (individu, kelompok, organisasi), forum dan mekanisme pembahasan kepentingan publik, potensi wilayah, masyarakat rentan, masalah sosial dan lain-lain. Ami dan Maya (2016, pp. 1-19), mengatakan bahwa pemetaan sosial ekonomi dapat melihat karakteristik kemampuan sosial ekonomi masyarakat.

Pemetaan sosial juga mampu memberikan gambaran yang lebih transparan, spesifik, terukur dan mampu menggali kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Rudito dan Famiola (2013, p. 141), menjelaskan bahwa pemetaan sosial juga memuat pemetaan jaringan sosial untuk menggambarkan hubungan-hubungan sosial di antara rumah tangga atau para anggota kelompok atau komunitas yang diamati. Namun sebenarnya tujuan *social mapping* lebih dari itu, yaitu bagaimana masyarakat sadar akan masalah yang sedang dihadapinya, masyarakat tahu akan potensi-potensinya, dan paham akan kebutuhannya serta masyarakat tergerak untuk melakukan pengembangan diri/aksi mengoptimalkan potensinya untuk menyelesaikan masalahnya.

Masalah sosial berkaitan dengan kondisi sosial yang menyangkut keberadaan individu-individu dalam masyarakat seperti kondisi keterpurukan kesejahteraan masyarakat antara lain kemiskinan, ketertinggalan tingkat pendidikan, pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), penyebaran penyakit, kecenderungan bunuh diri, penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba (Rudito & Famiola, 2013, p. 39). Sedangkan pemetaan masalah sosial suatu kewilayahan meliputi penggambaran suatu wilayah tentang kondisi geografis, demografis, psikografis, dan sosial budaya.

Kondisi geografis meliputi luas wilayah, pertumbuhan penduduk, sarana jalan, infrastruktur desa, struktur tanah dan lahan, serta kepadatan pemukiman. Sedangkan kondisi demografis berupa komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, tingkat pendapatan, tingkat kelahiran, tingkat kematian dan perpindahan. Sementara itu, kondisi psikografis meliputi gaya hidup, perilaku sosial, aktivitas sosial, dan ketertarikan masyarakat. Kondisi sosial budaya berupa strata sosial masyarakat, karakteristik budaya keluarga, nilai interaksi sosial masyarakat, kelompok sosial, dan lembaga-lembaga sosial

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penting dilakukan pengabdian ini, sehingga tersusun gambaran atau kondisi wilayah dan masyarakat tentang kondisi geografi, demografi, psikografi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat, serta urgensi penanganan masalah sosial pada wilayah non pesisir.

## **METODE PELAKSANAAN**

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (*Focus Group Discussion*), observasi, dan survei. Data sekunder adalah data agregat kependudukan (2016) dan

dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang diambil dari desa/kelurahan, kecamatan dan sumber lainnya. Responden sebanyak 100 responden terdiri dari 20 responden pada 5 kelurahan wilayah non pesisir yaitu NP1, NP2, NP3, NP4, dan NP5. Responden meliputi komponen masyarakat yaitu Lurah/Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, PKK, Karang Taruna, LKMD/K, dan UMKM, serta masyarakat. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner.

Analisis data pada penelitian ini secara deskriptif dan analisis SWOT. SWOT merupakan akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Analisis SWOT membantu mengidentifikasi kompetensi utama organisasi dalam hal melihat potensi kekuatan dan pemanfaatannya dalam menggali peluang dan menangkal ancaman; juga mengidentifikasi kelemahan dalam rangka memperbaiki kelemahan tersebut (Agarwal, Grassl & Pahl, 2012). Sedangkan urgensi penanganan masalah sosial berdasarkan pembobotan bidang masalah. Arahan/rekomendasi berupa program yang dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta meminimalisasi kekurangan dan ancaman yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah bukan pesisir adalah wilayah yang berbatasan dengan kelurahan lain. Kondisi geografi wilayah bukan pesisir (NP1, NP2, NP3, NP4, dan NP5) di Kabupaten Gresik adalah sama antara lain ketinggian tanah antara 1-4 meter dari permukaan laut, jarang hujan, dataran rendah, dan bercuaca panas.

Tabel 1. *Peruntukan Wilayah*

No	Keterangan	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5
1.	Luas Wilayah	63,75 Ha	65,36 Ha	18,13 Ha	78,00 Ha	8,58 Ha
2.	Pemukiman/perumahan	48,25%	9,73%	86,77%	10,21%	74,48%
3.	Bangunan untuk umum: jalan, sekolah, pertokoan/ perdagangan, pasar, tempat peribadatan, industri, sarana olahraga	22,75%	84,57%	9,29%	80,00%	10,00%
4.	dll: tanah wakaf, tambak/oloran, TKD	1,57%	5,70%	3,94%	9,79%	15,53%

Sumber: hasil pengolahan data

Tingkat aktivitas masyarakat pada kelurahan tersebut terlihat cukup padat serta mendorong pertumbuhan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Dari Tabel 1, diperoleh informasi bahwa sebagian besar wilayah Kelurahan NP1, NP3 dan NP5 lebih banyak diperuntukkan pemukiman. Tetapi sebagian besar wilayah Kelurahan NP2, dan NP4 lebih banyak diperuntukkan bangunan umum berupa jalan, kantor, pertokoan, sekolah, sarana olah raga, pasar, dan tempat peribadatan, serta industri.

Sementara itu, tanah di wilayah bukan pesisir sudah banyak yang bersertifikat. Kenyataan ini diperoleh bahwa Kelurahan NP1 (98,63%), NP3 (90%), NP2 (80,71%) unit tanahnya sudah bersertifikat. Sedangkan kelurahan NP4 (84,48%) unit tanahnya belum bersertifikat.

Tabel 2. *Data Kependudukan*

No.	Keterangan	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5
1.	Jumlah Penduduk (org)	6.267	1.911	5.960	7.858	3.493
2.	Penduduk laki-laki (%)	49,69	51,60	50,39	50,60	49,21
3.	Penduduk wanita (%)	50,31	48,40	49,62	49,40	50,79
4.	Kepadatan penduduk/wilayah pemukiman (org/Ha)	130	300	507	987	547
5.	Jumlah rumah tangga (RT)	1.355	494	1.981	2.129	999
6.	Kepadatan RT/wilayah pemukiman (KK/Ha)	28 KK	78 KK	168 KK	267 KK	156 KK
7.	Rata-rata orang per RT	5	4	3	4	4

Sumber: hasil pengolahan data

Sebagian besar wilayah bukan pesisir ini adalah padat penduduk dengan jumlah penduduk wanita dan laki-laki hampir sama. Dari Tabel 2, diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama pada 5 kelurahan. Kepadatan penduduk/wilayah pemukiman di Kelurahan NP2, dan NP3, NP4, dan NP5 adalah tinggi, tetapi kepadatan tersebut rendah di Kelurahan NP1. Sedangkan, kepadatan rumah tangga/wilayah pemukiman di Kelurahan NP2, NP3, NP4, dan NP5 adalah tinggi. Tetapi kepadatan tersebut rendah di Kelurahan NP1. Sementara itu, rata-rata orang per rumah tangga antara 3- 5 orang.

Masyarakat pada wilayah bukan pesisir ini aktif belajar dan menjalankan kegiatan keagamaan yang dianutnya dengan sarana dan fasilitas beribadah yang sudah baik dan lengkap. Sumber sarana air bersihnya hanya air PAM, perpipaan, dan air didapat dengan membeli ke pedagang. Semua rumah tangga di wilayah ini sudah menggunakan listrik. Tidak ada warga yang buang air besar di sungai/kali/parit/sekokan. Semua rumah memiliki jamban/WC.

Tabel 3. *Kondisi Ekonomi*

No.	Keterangan	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5
1.	Usia produktif terserap sabagai tenaga kerja (%)	65,47	47,97	21,79	39,84	62,24
2.	Pendapatan untuk kebutuhan pangan (%)	70	75	70	40	35

Sumber: hasil pengolahan data

Sebagian besar warga pada wilayah bukan pesisir ini belum sejahtera. Dari Tabel 3, diperoleh informasi bahwa sedikit warga yang terserap sebagai pekerja yaitu di Kelurahan NP2 (47,97%), NP3 (21,79%), dan NP4 (39,84%). Pekerjaan warga antara lain pegawai negeri sipil, karyawan swasta dan wiraswasta/usaha mikro,kecil, dan nelayan. Tetapi sebagian besar pekerja memiliki penghasilan kecil sehingga hanya untuk kebutuhan pangan. Meskipun demikian kondisi rumah dari warga pada 6 wilayah ini cukup baik, yaitu kebanyakan rumah menggunakan listrik, berdinding tembok, berlantai ubin/keramik, beratap genteng. Sebagian besar rumah tersebut berstatus milik sendiri. Sebagian besar warga mempunyai media komunikasi seperti televisi, *handphone*, parabola, dan internet.

Tabel 4. *Unit Ekonomi dan Pajak*

No.	Keterangan	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5
1.	Unit Ekonomi:					
	Industri besar	-	4	2	-	-
	Industri sedang	18	-	-	-	-
	Industri rumah tangga	3	-	81	40	25
	Kios	2	-	22	-	50
	Koperasi	-	5	6	2	1
	Tambak, peternakan, pekelangan (Ha)	-	-	-	-	-
2.	Pajak:					
	(Rp jutaan)/tahun	141,31	46,45	131,48	-	77.788
	Wajib pajak (unit)	1.095	410	1.151	-	850

Sumber: hasil pengolahan data

Kegiatan ekonomi pada wilayah industri ini aktif. Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa industri besar dan sedang ada di Kelurahan NP2, dan NP3. Tetapi dukungan pajak pada semua wilayah tersebut belum optimal baik dari nilai dan wajib pajak. Selain itu, industri rumah tangga atau UMKM pada wilayah tersebut kurang berkembang. Masalah yang dihadapi mereka antara lain kurangnya modal dan jaringan pemasaran. Jenis UMKM yang ada pada wilayah tersebut sebagian besar untuk pangan yaitu opak, krupuk ikan, terasi, bandeng asepi, budidaya lele, pudak, keripik kentang, jubung, kue, tempe, dan lontong. Kemudian UMKM untuk sandang seperti kebutuhan keagamaan yaitu songkok, baju muslim. Lainnya untuk perdagangan seperti kedai kopi, counter pulsa hp, toko kelontong, dan warung nasi.

Lurah/kepala desa memiliki peran penting dan sentral di masyarakat, dengan memiliki hubungan langsung terhadap lembaga masyarakat yang ada. Disamping itu, wilayah non pesisir ini dapat muncul potensi sosial dari kelompok rentan. Program CSR sudah banyak di 5 wilayah tersebut tetapi masih belum berdampak. Hanya CSR berupa program beasiswa dan setelah lulus diterima sebagai karyawan serta peminjaman modal kerja dinilai sebagai program yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan (Lihat Tabel 5). Keadaan tersebut juga diperkuat dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Treatments*) tentang masyarakat dan wilayah industri yang dijabarkan pada Tabel 6.

Tabel 5. *Kondisi Sosial*

No	Keterangan	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5
1.	Lembaga masyarakat yang pengaruh besar dan kepentingan tinggi	Lurah, Ketua RT, Kesra, Posyandu, Takmir Masjid, BKM, PKK, Ketua RW	Lurah, Organisasi UMKM, LKMD, Takmir Masjid, RW, RT, PKK, BKM, Kesra	Lurah, Tokoh masyarakat, pedagang	Lurah, Ketua RT & RW, BKM, PKK, Posyandu, dan Takmir Masjid	Lurah, Posyandu, PKK, Kesra, Muslimat, dan Takmir Masjid
2.	Kelompok rentan	200 KK miskin, 547 balita, 438 lansia	50 KK miskin, 79 balita, 109 lansia, 15 ibu hamil	79 KK miskin, 425 balita, 364 lansia, 48 ibu hamil	53 KK miskin, 606 balita, 641 lansia, dan 123 ibu hamil	289 KK miskin, 208 balita, 170 lansia

Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 6. Analisis SWOT

No.	SWOT	Keterangan
1.	Kekuatan	Kondisi jalan baik sehingga transportasi lancar; Sarana kesehatan, pendidikan dan umum relatif memadai Banyaknya tenaga kerja dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai; Sebagian besar masyarakat memiliki media komunikasi; Minat masyarakat yang cukup tinggi untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan sdm; Masyarakat aktif terhadap kegiatan sosial dan keagamaan khususnya agama Islam. Minat masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur publik sudah baik, karena infrastruktur tersebut untuk kepentingan mereka.
2.	Kelemahan	Sarana umum yang ada hanya pasar, koperasi, dan mini market Banyak organisasi sosial, masyarakat belum berdaya Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bersih dan pembayaran pajak masih kurang,
3.	Peluang	Adanya dukungan yang baik dari perusahaan dan pemerintah kelurahan/desa terhadap kegiatan masyarakat terutama program CSR yang berkelanjutan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, perkembangan wilayah dan kebersihan lingkungan; Berpeluang berkembangnya UMKM pakaian muslim.
4.	Tantangan	Banyak industri besar dan UMKM, tetapi kurang menyerap warga lokal sebagai pekerja meskipun pendidikan dan ketrampilannya memadai, sehingga banyak pengangguran Warga lokal yang bekerja dengan penghasilan yang kecil Memiliki masalah banjir karena selokan kotor.

Sumber: Hasil pengolahan data

Terdapat delapan bidang masalah yang dihadapi masyarakat wilayah industri tersebut yaitu lingkungan, kesejahteraan masyarakat, sosial dan agama, sarana dan prasarana, kurang berkembangnya UMKM, kesehatan, peranan kelurahan belum optimal, serta pendidikan. Melalui analisis SWOT, maka dibuat rekomendasi program pada 8 bidang masalah tersebut yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rekomendasi Program

Masalah, Kondisi, dan Rekomendasi Program
Masalah lingkungan: Banjir, pinggir pantai/laut kotor, bau, dan terkontaminasi polusi udara, sampah dan masalah air bersih. Solusi: 1) Perusahaan sekitar meminimalisasi timbulnya polusi udara dan pembuangan limbah pabrik ke laut karena berdampak pada kesehatan warga. 2) Pelatihan penanganan bencana dan pembinaan tim tanggap darurat seperti banjir, polusi udara, dll dengan melibatkan partisipasi masyarakat 3) Program kebersihan pinggir laut/pantai dan kesehatan lingkungan. Kerjasama antara Pemda, masyarakat, dan perusahaan sekitar. 4) Pembentukan dan pendampingan bank sampah serta pelatihan pengelolaan sampah menjadi produk bernilai lebih ( <i>value added</i> ) 5) Konservasi bakau ( <i>mangrove</i> ) dan dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran bersih lingkungan seperti kebersihan saluran air untuk mengatasi banjir.

---

Masalah, Kondisi, dan Rekomendasi Program

---

Kesejahteraan masyarakat kemiskinan, pengangguran, hasil laut belum optimal mendukung kesejahteraan masyarakat, bahkan semakin menurun.

Solusi:

- 1) Santunan KK miskin dan anak yatim
- 2) Perusahaan besar dapat menyerap tenaga kerja melalui pengembangan bisnisnya di bidang:
- 3) Jasa pendidikan: mendirikan SD, SMP, SMA yang berkualitas, lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan seperti tsanawiyah dan Aliyah, pendidikan profesi yang bersertifikat nasional
- 4) Jasa non pendidikan: hotel, koperasi, super-market, perumahan.
- 5) Pemanfaatan optimal sumber daya laut
- 6) Pelatihan dan pendampingan untuk nilai tambah hasil tangkapan ikan laut, budi daya ikan laut atau air payau untuk lebih memberdayakan nelayan dan organisasinya.
- 7) Sosialisasi kepada nelayan tentang keselamatan melaut.
- 8) Adanya asuransi untuk nelayan melaut.
- 9) Pemberdayaan nelayan yang tidak punya pekerjaan
- 10) Membangun warga menjadi wirausahawan dengan potensi yang ada dan membangun kreatifitas mereka untuk mampu menghasilkan produk melalui pelatihan kewirausahaan terutama untuk pengolahan dan kemasan kuliner olahan hasil laut dan handicraft dari SDA yang ada yaitu kerang, sisik ikan dan lain-lain.
- 11) Produk sampingan perusahaan agar dapat dikelola oleh masyarakat.

---

Masalah sosial dan agama: Kenakalan remaja, adanya ketidakpedulian masyarakat khususnya pendatang, sebagian besar warga ingin aktif melaksanakan kegiatan sosial dan agama, masyarakat kurang peduli khususnya pendatang, dan banyaknya penduduk usia tidak produktif ( $\geq 65$  tahun)

Penanganan masalah melalui:

- 1) Pelatihan peningkatan motivasi untuk maju bersama
- 2) Kegiatan yang melibatkan partisipasi banyak warga seperti lomba kebersihan lingkungan, penghijauan lingkungan
- 3) Dukungan fasilitas untuk ziarah bersama dan lomba keagamaan (qosidah, maulid)
- 4) Menyelenggarakan kegiatan ajang prestasi seni dan budaya tingkat kelurahan maupun kabupaten bekerjasama dengan wilayah lainnya

---

Masalah sarana dan prasarana: Masih ada warga yang BAB di pinggir pantai/ laut, sarana pelayanan kelurahan kepada masyarakat belum memadai, taman terbuka hijau yang kurang, serta kurang optimal fungsi Tanah Khas Daerah.

Penanganan masalah melalui:

- 1) Dibutuhkan bantuan WC umum untuk meningkatkan kesadaran bersih lingkungan
- 2) Dukungan kepada kelurahan/desa berupa: tempat sampah, gerobak sampah dorong, kerandang mayat beroda, bak-bak pembuangan sampah, dan pompa air
- 3) Taman hijau terbuka
- 4) Pemanfaatan Tanah Khas Daerah untuk pasar atau gedung serba guna untuk sarana olahraga dan pemberdayaan masyarakat atau lahan hidroponik
- 5) Dukungan untuk kelurahan berupa
- 6) Mobil jenazah, mobil siaga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 7) Mobil perpustakaan keliling dan peralatan bermain anak-anak
- 8) Bantuan modal BUMDes
- 9) Fasilitas untuk kegiatan pertandingan olahraga

---

Kurang berkembangnya UMKM, kurangnya modal usaha, dukungan pemasaran kurang, dan banyaknya warung kopi

Penanganan masalah melalui:

- 1) Peminjaman modal kerja untuk UMKM, dapat bersumber dari perbankan, lembaga keuangan, dan BUMN
-

---

Masalah, Kondisi, dan Rekomendasi Program

---

- 2) Kegiatan pameran, bazar baik di dalam dan luar kota, pelatihan IT untuk pemasaran online
  - 3) Pelatihan dan pendampingan peracikan kopi
  - 4) Disarankan pembinaan ukm bekerjasama dengan Dinas UKM dan koperasi.
- 

Masalah Kesehatan: Saluran infeksi pernafasan, demam berdarah, dan muntaber.

Penanganan masalah melalui:

- 1) Kampung sehat, pemeriksaan papsmear, dan pengobatan gratis
  - 2) Fogging
  - 3) Membangun Puskesmas Pembantu bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten.
  - 4) Adanya sosialisasi tentang hidup sehat dalam lingkungan dan pendampingan budaya bersih dan sehat di rumah tangga serta penyuluhan pencegahan penyakit yang berbahaya
- 

Peranan kelurahan belum optimal, belum transparansi dana CSR, kurang dekat aparat kelurahan dengan masyarakat, kurangnya pembinaan pemuda, sulitnya pengurusan sertifikat tanah, dan KB kurang berhasil.

Penanganan masalah melalui:

- 1) Pengajuan dana CSR untuk pemberdayaan masyarakat melalui satu pintu yaitu perangkat kelurahan. Juga dilakukan pertanggung jawaban serta pengawasan terhadap dana yang diberikan
  - 2) Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain kelancaran pengurusan sertifikat tanah, izin usaha, KTP, dll
  - 3) Mengikutsertakan pemuda, masyarakat bahkan tokoh masyarakat dalam banyak hal kegiatan sebagai warga masyarakat, antara lain pihak kelurahan bersama masyarakat bahkan tokoh masyarakat mensosialisasikan program-program kemasya-rakatan dan pembangunan daerah secara rutin, sosialisasi bahaya narkoba yang bekerjasama dengan pihak kepolisian dan BNN daerah. Juga sosialisasi penyakit kelamin, pajak, keluarga berencana
  - 4) Kelurahan lebih memberdayakan organisasi karang taruna, perkumpulan nelayan, PKK, dan organisasi keagamaan
  - 5) Kelurahan menginventarisasikan kualifikasi tenaga kerja dan kualifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar.
  - 6) Kelurahan memfasilitasi sarana olah raga yang memadai sehingga remaja akan tersalurkan aktifitasnya untuk kegiatan sportif dan menyelenggarakan suatu kegiatan tournament untuk prestasi mereka bekerjasama dengan perusahaan sekitar.
  - 7) Membangun komunitas pemuda yang kreatif dan dinamis dalam kondisi era teknologi canggih saat ini (komunitas digital).
- 

Masalah pendidikan: Putus sekolah, kurangnya kesempatan untuk berpendidikan lebih tinggi.

Penanganan masalah berupa:

- 1) Membangun PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan paket C, untuk mengakomodir warga yang putus sekolah. Selain itu, PKBM ini juga dapat menyelenggarakan pendidikan maupun pelatihan bidang lainnya, pelatihan vokasi bagi masyarakat.
  - 2) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi tenaga kerja yang sesuai standar kualitas/kompetensi yang dipersyaratkan oleh perusahaan sekitar melalui lembaga PKBM yang dibangun bekerjasama dengan dunia industri.
  - 3) Adanya pelatihan untuk meningkatkan nilai jual di pasar tenaga kerja
  - 4) Beasiswa
  - 5) Dukungan biaya paket A, B, C dengan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - 6) Bantuan peningkatan pendidikan untuk guru.
- 

Sumber: Hasil pengolahan data

Urgensi penyelesaian masalah pada tiap wilayah pengamatan berbeda. Berdasarkan Tabel 8, dapat dijabarkan bahwa 3 masalah utama pada NP1 adalah sarana dan prasarana, lingkungan, dan kurang berkembangnya UMKM. Ada itu 3 masalah utama pada NP2 adalah sarana dan prasarana, kurang berkembangnya UMKM, dan lingkungan. Ada 3 masalah utama pada NP3 adalah lingkungan, sarana dan prasarana, serta peranan kelurahan belum optimal. Ada 3 masalah utama pada NP4 adalah lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Ada 3 masalah utama pada NP5 adalah kurang berkembangnya UMKM, peranan kelurahan belum optimal, dan kesehatan. Dengan demikian dapat diketahui 3 masalah utama masyarakat pada 5 wilayah non pesisir di Kabupaten Gresik adalah sarana prasarana yang kurang memadai, lingkungan, dan kurang berkembangnya UMKM.



Gambar 1. Pelatihan Cara Pengisian Daftar Pertanyaan oleh Responden

Daerah bukan pesisir di Kabupaten Gresik dapat didorong pertumbuhan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik mengingat kondisi geografis yang dimilikinya yaitu ketinggian tanah dari permukaan laut relatif setinggi 3-4 meter, jarang hujan, dataran rendah, dan bercuaca panas. Akses ke wilayah tersebut mudah dijangkau. Kondisi sebagian besar jalan baik, meskipun sebagian jalan masih rusak dikarenakan pengaruh kendaraan besar. Wilayah tersebut dipergunakan untuk pemukiman, bangunan umum seperti perkantoran, toko. Daerah bukan pesisir tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah dan industri karena daerah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi dan akan terus bertambah. Sementara itu fasilitas umum yang ada dinilai belum memadai.

Kabupaten Gresik dikenal sebagai wilayah santri. Mayoritas masyarakat wilayah bukan pesisir beragama Islam. Masyarakat aktif belajar dan melaksanakan kegiatan keagamaannya. Disamping itu, sarana dan prasarana kegiatan keagamaan yang dimiliki wilayah tersebut sudah baik dan lengkap.

## SIMPULAN

Kondisi wilayah Kabupaten Gresik yang berupa banyaknya industri belum mendukung kesejahteraan penduduk dan pengembangan wilayah. Penduduk belum sejahtera, tetapi pendidikan dan ketrampilan relatif memadai. Sementara itu, UMKM di wilayah tersebut kurang berkembang dan masalah yang dihadapi mereka adalah kurangnya modal dan kurangnya jaringan pemasaran.

Pemerintah daerah dan industri-industri di Kabupaten Gresik perlu bersinergi dalam menjalankan program peningkatan masyarakat dan pengembangan wilayah dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki masyarakat dan wilayah tersebut. Sehingga kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah dapat tercapai tanpa menimbulkan masalah baru.

Lurah memiliki kekuatan besar dan kepentingan tinggi bagi masyarakat dan organisasai kemasyarakatan yang ada. Program CSR sudah banyak tetapi belum berdampak. Hanya program beasiswa dan setelah lulus dapat diterima sebagai karyawan yang dinilai sebagai program yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Kelompok rentan terdiri KK miskin, balita, ibu hamil, dan lansia.

## REFERENSI

- Agarwal, R., Grassl, W., & Pahl, J. (2012). Meta-SWOT: Introducing a new strategic planning tool. *Journal of Business Strategy*, 33(2), 12-21.
- Dilham, A., & Putra, U. M. (2016). Pemetaan sosial ekonomi masyarakat pematang siantar (Studi kasus masyarakat Siantar Barat). *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 74-92.
- Dukcapil Gresik. (2016). *Data agregat kependudukan semester 1 tahun 2016*. Gresik: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
- Rudito, B., & Famiola, M. (2013). *Social mapping: Metode pemetaan sosial: Teknik memahami suatu masyarakat atau komunitas*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Situmeang, I. (2016). *Corporate social responsibility, dipandang dari perspektif komunikasi organisasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Untung, H. B. (2008). *Corporate social responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Untung, H. B. (2014). *CSR dalam dunia bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.